

BAB V

PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bagian akhir dari hasil analisis kajian penelitian. Bab ini memaparkan hasil dari bab satu sampai empat tentang pola pemekaran Desa Tempirai Barat Kabupaten PALI. Selain itu juga, bab ini juga memberikan saran kepada *stakeholder* untuk selalu memiliki kontribusi dalam partisipasi di wilayahnya seperti dalam hal pemekaran wilayah baik di tingkat desa, kota, kabupaten ataupun provinsi terutama di wilayah Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya yang telah didapatkan melalui wawancara, dapat diketahui bahwa kurang lebih sepuluh tahun Desa Persiapan Tempirai Barat Kabupaten PALI tidak mendapatkan kejelasan mengenai status desanya apakah menjadi desa definitif atau kembali ke desa induk. Desa Persiapan Tempirai Barat 80% telah melengkapi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Desa untuk menjadi desa definitif. Sementara itu, DPRD sebagai wakil rakyat dipemerintahan terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita desa tersebut untuk menjadi desa definitif, walaupun desa tersebut tidak bisa menjadi definitif setidaknya pada tahun 2022, Desa Persiapan Tempirai Barat akan mendapatkan kejelasan status desa.

Proses pemekaran Desa Persiapan Tempirai Barat sangat panjang, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks, dan jika tidak segera dituntaskan akan menciptakan konflik horizontal bahkan vertikal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Desa Persiapan Tempirai Barat belum menjadi desa definitif, hal tersebut diantaranya yaitu:

1. Masih kurangnya jumlah penduduk/KK untuk menjadi desa definitif

2. Tidak adanya hasil evaluasi satupun desa persiapan yang di laporkan atau masuk ke DPRD Kabupaten PALI terkhusus Desa Persiapan Tempirai Barat. hasil evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu desa. hasil evaluasi menunjukkan progres suatu desa yang akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah. Akan tetapi hasil evaluasi tidak pernah disampaikan kepada DPRD Kabupaten PALI.
3. Adanya campur tangan elit politik. Hal ini dikatakan karena proses panjang yang sudah dilalui Desa Tempirai Barat yaitu sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun.
4. DPMPD tidak melakukan tugasnya secara optimal.

Adapun solusi yang ditawarkan berbagai stakeholder untuk Desa Persiapan Tempirai Barat, yaitu:

1. Bagi penduduk yang telah menikah, segera memisahkan Kartu Keluarga
2. Meminjam Kartu Keluarga Desa lain untuk menutupi kekurangan persyaratan.
3. DPMPD segera melaporkan kepada Kabupaten mengenai progres desa-desa persiapan di Kabupaten PALI terkhusus Desa Persiapan Tempirai Barat yang di mana desa tersebut 80% telah memenuhi persyaratan. Apabila hal tersebut dilakukan DPRD bisa meminta rekomendasi kepada Dirjen Kependudukan Pusat untuk segera mendefinitifkan Desa Persiapan Tempirai Barat dengan alasan-alasan yang rasional.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya tindak lanjut pemerintah kabupaten secara masif, agar pemekaran wilayah terutama di Kabupaten PALI mendapatkan kejelasan. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari berbagai aspek baik itu, ekonomi, sosial dan yang paling utama adalah perihal pelayanan publik. Selain itu juga pemerintah harus tegas dalam mengambil keputusan terutama mengenai pemekaran desa, jika memang desa tersebut pantas menjadi desa definitif maka segera di sahkan, jika tidak segera kembalikan desa persiapan ke desa induk. Sehingga tidak ada tumpang tindih wewenang yang di mana jika ini terjadi akan mengakibatkan kecemburuan sosial diantara masyarakat.
2. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu wilayah, oleh karena itu untuk masyarakat di Indonesia jangan takut untuk menyuarakan, agar terciptanya sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.